



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H M JAMIL IBRAHIM
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 461200

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.992.755.000

1. Tanah Seluas 631 m2 di PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. Tanah Seluas 3030 m2 di PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 476 m2/168 m2 di PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah Seluas 1815 m2 di PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 2713 m2 di PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 124.955.000
6. Tanah Seluas 704 m2 di PIDIE JAYA, HASIL SENDIRI Rp. 72.800.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 700 m2/200 m2 di KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
8. Tanah Seluas 4000 m2 di PIDIE JAYA, WARISAN Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 7.500.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. ----

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.000.255.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.000.255.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



-
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **19 Desember 2018**.
 4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.